



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Teuku Umar RT. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian Tarakan  
Telpon (0551) 21349-34499 Fax. (0551) 34499  
Email : [dinsospmkotatarakan@gmail.com](mailto:dinsospmkotatarakan@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KOTA TARAKAN**  
**NOMOR 44 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 08.1 TAHUN 2022 TENTANG**  
**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022 untuk kelancaran penanganan pengaduan masyarakat yang efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu merubah Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 08.1 Tahun 2022 tentang Penetapan Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
- b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dilaksanakan melalui meja informasi, kotak pengaduan, e-mail serta Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan petugas pengelola pelayanan pengaduan masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penanganan Pengaduan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 08.1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN TAHUN 2022

**KESATU** : Menetapkan Saudara **RINA KANTI LESTARI, S.T., M.H, NIP. 19810421 200902 2 004** sebagai Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022.

KEDUA : Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, mempunyai tugas :

Menerima, mencatat dan menangani administrasi berkas pengaduan dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dan aparatur negara untuk ditindaklanjuti/proses lebih lanjut, sesuai dengan prosedur dan mekanisme standar penanganan pengaduan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tarakan  
Pada tanggal : 26 Juli 2022

KEPALA DINAS,



ARBAIN, S.E., M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680318 199403 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Tarakan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Kota Tarakan;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan;
5. Sdr. RINA KANTI LESTARI, S.T., M.H;
6. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Teuku Umar RT. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian Tarakan  
Telpn (0551) 21349-34499 Fax. (0551) 34499  
Email : [dinsospmkotatarakan@gmail.com](mailto:dinsospmkotatarakan@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KOTA TARAKAN**  
**NOMOR 07.1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 44 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan atau perubahan personil Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 untuk kelancaran penanganan pengaduan masyarakat yang efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu merubah Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022;
- b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dilaksanakan melalui meja informasi, kotak pengaduan, e-mail serta Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan petugas pengelola pelayanan pengaduan masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penanganan Pengaduan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN TAHUN 2022

**KESATU** : Menetapkan personil yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023.

KEDUA : Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, mempunyai tugas :

1. Menerima, mencatat dan menangani administrasi berkas pengaduan dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dan aparatur negara untuk ditindaklanjuti/proses lebih lanjut, sesuai dengan prosedur dan mekanisme standar penanganan pengaduan;
2. Menerapkan Standar Pelayanan;
3. Menjunjung tinggi dan menerapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan;
4. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan dan informasi publik;
5. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan;
6. Melaporkan kepada Pimpinan pelaksanaan tugas dan kemajuan pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat secara periodik.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tarakan  
Pada tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA DINAS,  
  
**ARBAIN, S.E., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680318 199403 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Tarakan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Kota Tarakan;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 07.1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022.

**Nama-Nama Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat  
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Arbain, S.E., M.A.P	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Drs. H. Jamaluddin Malla	Kepala Bidang Sosial	Ketua Tim
3	Agustina, S.K.M	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Wakil Ketua
4	Rina Kanti Lestari, S.T., M.H	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	Sekretaris
5	Afriyona Maida, S.E., M.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Yuni Ekowati, S.S.T	Penyuluh Sosial Muda	Anggota
7	Ir. Rosmala	Penyuluh Sosial Muda	Anggota
8	Zulfa Ilmiah Sunni, S.S.T	Pekerja Sosial Pertama	Anggota
9	Alghi Fari Smith, S.S.T	Pekerja Sosial Pertama	Anggota
10	Lidya Sriwahyuni, S.Pd	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)	Anggota
11	Rini Kustiwi	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)	Anggota
12	Heni Kurniawati, S.Psi	Konselor	Anggota

**KEPALA DINAS,**  
  
**ARBAIN, S.E., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680318 199403 1 007



PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Teuku Umar RT. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan 77121

Telp. (0551) 21329 Faks. (0551) 34499

Laman : <http://dinsos.tarakankota.go.id> Pos-el : [dinsospmkotatarakan@gmail.com](mailto:dinsospmkotatarakan@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA TARAKAN  
NOMOR 400.9/10.1/DINSOSPM

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 07 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA TARAKAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 untuk kelancaran penanganan pengaduan masyarakat yang efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu merubah Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penetapan Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022;
- b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dilaksanakan melalui meja informasi, kotak pengaduan, e-mail serta Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan petugas pengelola pelayanan pengaduan masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
  8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penanganan Pengaduan;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Standar Pelayanan;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
  15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN TAHUN 2022

- KESATU : Menetapkan personil yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024;
- KEDUA : Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, mempunyai tugas :
1. Menerima, mencatat dan menangani administrasi berkas pengaduan dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dan aparatur negara untuk ditindaklanjuti/proses lebih lanjut, sesuai dengan prosedur dan mekanisme standar penanganan pengaduan;
  2. Menerapkan Standar Pelayanan;
  3. Menjunjung tinggi dan menerapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan;
  4. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan dan informasi publik;
  5. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan;
  6. Melaporkan kepada Pimpinan pelaksanaan tugas dan kemajuan pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat secara periodik.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tarakan  
Pada tanggal : 02 Mei 2024

**KEPALA DINAS,**



**ARBAIN, S.E., M.A.P**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680318 199403 1 007**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Tarakan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Kota Tarakan;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 400.9/10.1/DINSOSPM Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022.

**Nama-Nama Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat  
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Arbain, S.E., M.A.P	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Drs. H. Jamaluddin Malla	Kepala Bidang Sosial	Ketua Tim
3	Agustina, S.K.M	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Wakil Ketua
4	Rina Kanti Lestari, S.T., M.H	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	Sekretaris
5	Afriyona Maida, S.E., M.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Hamsiah, S.E	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
7	Ir. Rosmala	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
8	Zulfa Ilmiah Sunni, S.S.T	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
9	Alghi Fari Smith, S.S.T	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
10	Lidya Sriwahyuni, S.Pd	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)	Anggota
11	Rini Kustiwi	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)	Anggota
12	Heni Kurniawati, S.Psi	Konselor	Anggota

**KEPALA DINAS,**  
  
**ARBAIN, S.E., M.A.P**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680318 199403 1 007**